

LAPORAN KINERJA (LAKIN)
TAHUN 2024
DAN
PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN
2024



KPP PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK SATU

Jalan Arjuna Selatan No.1 Kebon Jeruk Jakarta Barat

021-5355762/5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, KPP menyelenggarakan fungsi :

1. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
3. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
4. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
7. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
8. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
9. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
10. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
11. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
12. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
13. pemutakhiran basis data perpajakan;
14. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
15. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
16. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
17. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
18. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
19. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
20. pelaksanaan administrasi kantor.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat mempunyai tugas menghimpun pajak Negara dan menyelenggarakan fungsi administrasi di bidang perpajakan. Peran strategis yang diemban tidak terlepas dari rencana kebijakan pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak secara keseluruhan, yaitu mengamankan penerimaan pajak. Dalam rangka mengamankan rencana penerimaan perpajakan tersebut perlu disusun langkah strategis diberbagai bidang seperti kebijakan, peningkatan kepatuhan, dan peningkatan sumber daya manusia.

KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu memiliki visi instansi yaitu menjadi Kantor Pelayanan Pajak Terbaik yang berkontribusi secara optimal dalam menghimpun penerimaan negara dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan : “ Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”. Visi tersebut diimplementasikan ke dalam tiga misi yaitu, (1) Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan yang modern secara efektif dan efisien; (2) Mengembangkan sumber daya aparatur yang kompeten dan berintegritas; dan (3) Mewujudkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan yang tinggi melalui edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat. Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu memiliki motto dan Janji Layanan yaitu Bekerja dengan Semangat, melayani dengan “CERMAT” : CERmat, RaMah, Andal, Tuntas.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu terdiri dari Kepala Kantor sebagai pimpinan yang membawahi:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

2. Seksi Penjamin Kualitas Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi

data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

3. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

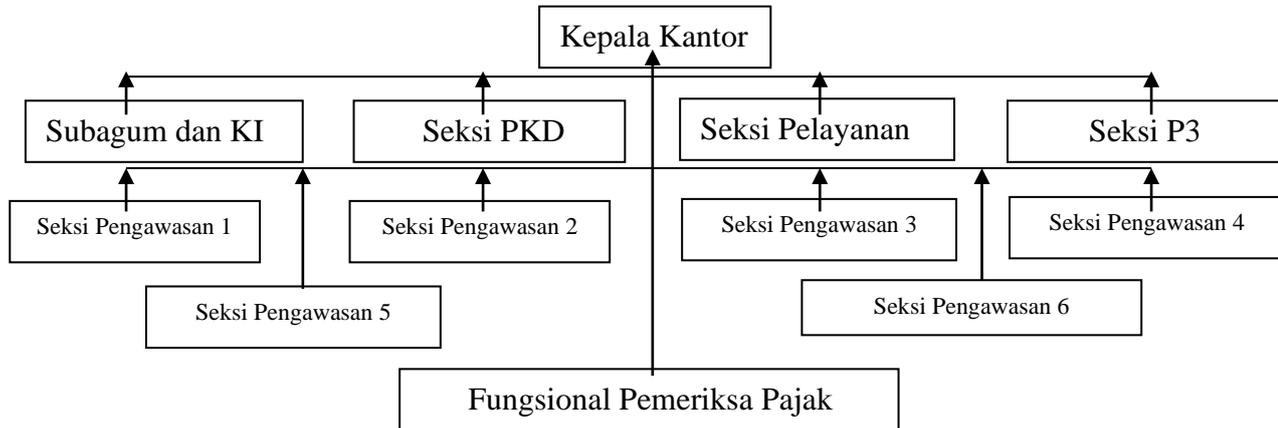
5. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI

Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

6. Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak

Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak melakukan pemeriksaan pajak yang meliputi pemeriksaan lengkap, pemeriksaan sederhana dan pemeriksaan dalam rangka penagihan.

Bagan 1: Struktur KPP Pratama Kebon Jeruk Satu



C. Profil Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu per 31 Desember 2024 adalah 92 orang, dengan komposisi pegawai sbb:

1. berdasarkan jabatan :

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Kantor	1 orang
2	Kepala Seksi	10 orang
3	Account Representative Pengawasan	31 orang
4	Juru Sita	2 orang
5	Bendaharawan	1 orang
6	Sekretaris	1 orang
6	Administrator Sistem/Operator Console	1 orang
7	Pelaksana	27 orang
8	Fungsional Pemeriksa Pajak	14 orang
9	Fungsional Penyuluh Pajak	3 orang
10	Asisten Fungsional Penyuluh Pajak	2 orang
Jumlah		93 orang

2. Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	I	-	-	-
2	II	15	18	33
3	III	28	22	50
4	IV	7	3	10
Total		50	43	93

3. Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	SD	-	-	-
2	SLTP	-	-	-
3	SLTA	1	1	2
4	D1	8	8	16
5	DIII	10	9	19
6	S1	19	19	38
7	S2	12	6	19
8	S3	-	-	-
Total		50	43	93

D. Sarana dan Prasarana

1. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)

Dilengkapi dengan fasilitas sistem antrian digital, *help desk*, *touch screen*, brosur/leaflet, Rumah Integritas, TurGalPot, Janji Labank/tempat pembayaran, Komputer untuk membuat kode biling, ruang konseling, *Playground*, Televisi dan Kamera CCTV, air minum gratis, alat pengukur suhu tubuh, dan tempat cuci tangan (protocol Kesehatan).

2. *Lay out* (tata ruang kerja)

Ruang kerja (*work space*) pegawai dibuat lebih terbuka sehingga mempermudah pengawasan dan komunikasi antar pegawai sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi.

3. Fasilitas dan peralatan kerja

Penyediaan fasilitas dan peralatan meliputi alat pengatur suhu ruangan, ruang rapat dengan dilengkapi proyektor dan sistem audio yang memadai, komputer, printer, *scanner*, mesin fingerprint, mesin fotokopi multifungsi, *plotter*, server, aula, Ruang Olahraga, poliklinik dan dokter, ruang konsultasi untuk wajib pajak, serta jaringan internet.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Sasaran Strategis

Rencana Strategis KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu sudah ditetapkan di awal tahun 2023 dalam bentuk PETA STRATEGI yang disusun oleh Kepala KPP dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu dan Kanwil DJP Jakarta Barat, sebagai langkah perencanaan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari KPP Pratama adalah untuk memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak di bidang Perpajakan yang nantinya akan mempengaruhi optimalisasi penerimaan pajak Negara.

Hal ini sejalan dengan visi Direktorat Jenderal Pajak: “Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan” dan berjalan beriringan pula dengan misi Direktorat Jenderal Pajak: (1) merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia; (2) meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan (3) mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, professional, dan bermotivasi.

Visi dan misi DJP tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan program operasional. Dalam rangka mengukur pencapaian visi dan misi DJP, telah ditetapkan indikator-indikator kinerja utama (IKU) sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja.

Sasaran Strategis yang hendak dicapai oleh KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Pajak Negara yang optimal;
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif;
5. Presentase Pengawasan pembayaran masa;
6. Pengujian kepatuhan material yang efektif;
7. Penegakan hukum yang efektif;
8. Data dan Informasi yang berkualitas;
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif; dan
10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel.

B. Indikator Kinerja

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, telah ditetapkan 19 (sembilan belas) indikator kinerja utama (IKU) yaitu:

- a. Persentase realisasi penerimaan pajak;
- b. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas;
- c. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM);
- d. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi;
- e. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM);
- f. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan;
- g. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan;
- h. Persentase pengawasan pembayaran masa;
- i. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
- j. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan;
- k. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu;
- l. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian;
- m. Tingkat Efektivitas Penagihan;
- n. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- o. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan;
- p. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM;
- q. Indeks Penilaian Integritas Unit;
- r. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko;
- s. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran;

C. Penetapan Kinerja

Adapun Penetapan Kinerja tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu :

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Persentase Pengawasan pembayaran masa	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%
		Tingkat efektivitas penagihan	75%
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%

8	Data dan Informasi yang berkualitas	Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85 (skala 100)
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu telah menetapkan 10 (sepuluh) sasaran strategis dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur pencapaian sasaran strategis organisasi tersebut. Pencapaian kinerja organisasi tersebut disajikan pada table dibawah ini:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100.62%	100.62%
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	102.15	102.15
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100.65%	100.65%
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	101.32%	101.32%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100.34%	100.34%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	88.80%	120%
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	106.3%	106.3%
5	Presentase Pengawasan pembayaran masa	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	110.57%	120%
6	Pengujian kepatuhan material yang	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	120%	120%

	efektif	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	119.53%	119.53%
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	119.32%	119.32%
7	Penegakan hukum yang efektif	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	120%	120%
		Tingkat efektivitas penagihan	75%	117.56%	120%
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100%	100%
8	Data dan Informasi yang berkualitas	Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	120%	120%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	117.50	117.50
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85 (skala 100)	95.35	112.18
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	99.44	110.49
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	120	120

Uraian Capaian Kinerja Organisasi

1. Sasaran Strategis 1: Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

a) Indikator Kinerja Utama 1: Persentase realisasi penerimaan pajak

Berdasarkan sejumlah sasaran yang ditetapkan, KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu berhasil mencapai target penerimaan pajak tahun 2024 yang telah dibebankan yaitu sebesar Rp. 976.498.961.000,- dengan total realisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 982.524.651.749,-. Dengan demikian persentase penerimaan pajak sebesar **100.62%**. Sementara itu pencapaian penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu tahun 2023 sebesar 104.08% dengan nominal Rp. 829.587.728.959,- yang artinya pencapaian penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu tahun 2024 mencapai target namun mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023.

b) Indikator Kinerja Utama 2: Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Realisasi pajak bruto KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp. 1.036.767.873.937 dan Rp. 881.111.435.546 sehingga terdapat pertumbuhan bruto positif sebesar 17.67%. Dari pertumbuhan unit kerja sebesar 117.67% dan pertumbuhan nasional sebesar 112.05%. Target pertumbuhan positif disebabkan karena KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu tetap berfokus dengan memaksimalkan potensi baik dengan bedah WP, analisis data internal dan eksternal dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Seementara itu, realisasi perencanaan kas pada tahun 2024 sebesar Rp 982.524.651.749 dari prognosa sebesar Rp. 923.525.228.162. Dari data tersebut diperoleh deviasi sebesar 11.64% dan realisasi IKU sebesar 90.00%.

Berdasarkan dua indikator di atas, capaian indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan desiasi proyeksi perencanaan kas adalah **102.15**.

2. Sasaran Strategis 2: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi.

a) Indikator Kinerja Utama 3: Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).

Berdasarkan sejumlah sasaran yang ditetapkan, KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu berhasil mencapai target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024 yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 880.311.772.000,- dengan total realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebesar Rp. 886.012.700.247,- sehingga capaian IKU PPM sebesar **100.65%**. Hal ini disebabkan karena pengawasan pembayaran dan pelaporan, dinamisasi angsuran masa, penelitian dan tindak lanjut data matching, dan pengawasan fasilitas telah dilaksanakan secara optimal.

b) Indikator Kinerja Utama 4: Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.

Realisasi Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan dari target WP Wajib SPT sebesar 30.131 terealisasi sebesar 30.711 atau sebesar 101.92% dari target yang ditetapkan sebesar 100.00% sehingga capaian IKU tersebut sebesar **101.92%**. Hal ini disebabkan karena sudah efektifnya penyuluhan dan sosialisasi luring maupun daring dalam kondisi pasca pandemi kepada Wajib Pajak. Langkah-

langkah yang telah dilaksanakan meliputi melaksanakan kelas pajak, himbauan melalui wa blast dan email blast, infografis di *media social*, penerbitan surat teguran, dan meningkatkan koordinasi dengan stakeholders dan pemberi kerja.

3. Sasaran Strategis 3: Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

a) Indikator Kinerja Utama 5: Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM).

Dari jumlah target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) yang ditetapkan sebanyak Rp. 96.187.189.000,- sedangkan jumlah realisasi kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) pada akhir tahun sebanyak Rp. 96.511.951.502,- atau sebesar 100.34% dari target yang ditetapkan sebesar 100.00%. Dengan demikian persentase penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) adalah **100.34%**. Hal ini disebabkan dengan adanya langkah-langkah dari berbagai pihak mulai dari pengawasan, penagihan, dan pemeriksaan dalam memanfaatkan analisis atas kegiatan pengawasan pembayaran, angsuran masa, dan data matching. Selain itu yang didukung dengan data-data potensi laporan hasil analisis dari Kanwil DJP Jakarta Barat yang membantu tercapainya target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM).

4. Sasaran Strategis 4: Edukasi dan pelayanan yang efektif

a) Indikator Kinerja Utama 6: Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Trajektori perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sebesar 74% dengan realisasi pada akhir Tahun 2024 sebesar 88.80%. Capaian realisasi tersebut dihitung berdasarkan 18.50 % dari capaian kegiatan (100.00 %), 28.12 % dari capaian perubahan perilaku lapor (100.00 %), dan 42.18 % dari perubahan perilaku bayar (115.45 %). Oleh karena itu capaian IKU tersebut sebesar **120%**. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/penyuluhan tersebut dilakukan secara berkala sesuai rencana kerja dan fokus pemberian sosialisasi kepada Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Bendahara dan Wajib Pajak Asosiasi yang potensial dalam meningkatkan penerimaan pajak.

b) Indikator Kinerja Utama 7: Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan melalui tatap muka realisasi sebesar 88.96 dengan aspek Kepuasan Pelayanan tatap muka (1) Tidak pernah mengeluarkan biaya atau memberikan imbalan kepada pihak KPP dengan realisasi sebesar 100.00; (2) Ketersediaan layanan konsultasi dan pengaduan di KPP dengan realisasi sebesar 94.43; (3) Sikap profesional dan/atau keramahan petugas dalam memberikan pelayanan di KPP dengan realisasi sebesar 89.66; (4) Maintain Keterampilan dan pengetahuan petugas dalam memberikan pelayanan di KPP dengan realisasi sebesar 88.86; (5) Kesesuaian hasil layanan yang diterima dengan ketentuan yang berlaku dengan realisasi sebesar 86.99; (6) Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan di KPP dengan realisasi sebesar 86.96; (7) Kemudahan prosedur pelayanan di KPP dengan realisasi sebesar 85.64; (8) Kesesuaian waktu penyelesaian pelayanan dengan standar pelayanan di KPP dengan realisasi sebesar 84.33; (9) Kualitas sarana dan prasarana di KPP dengan realisasi sebesar 83.78. Kemudian, Nilai Indeks dengan realisasi sebesar sebesar 81.41 dengan aspek Efektivitas Penyuluhan sebagai berikut (1) Penyuluh mampu berinteraksi dengan baik dengan realisasi sebesar 84.70; (2) Penyuluh mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dalam kegiatan penyuluhan dengan baik dengan realisasi sebesar 83.49; (3) Penyuluh mampu menyampaikan materi dengan baik sehingga dapat dipahami dengan realisasi sebesar 82.76; (4) Materi penyuluhan perpajakan yang disampaikan relevan atau sesuai dengan kebutuhan wajib pajak dengan realisasi sebesar 82.52; (5) Materi penyuluhan perpajakan yang disampaikan jelas dan mudah dipahami dengan realisasi sebesar 81.79; (6) Penyuluh menguasai materi dengan realisasi sebesar 81.30; (7) Penyuluh mampu mengatur waktu kegiatan penyuluhan dengan baik dengan realisasi sebesar 80.57; (8) Materi penyuluhan mudah diakses atau didapatkan dengan realisasi sebesar 78.15; (9) Informasi yang disampaikan dalam materi penyuluhan perpajakan telah lengkap dengan realisasi sebesar 77.42. Dengan demikian, realisasi indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan senilai 85.19 dari target 82 dan memiliki indeks capaian sebesar **106.30%**. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/penyuluhan tersebut dilakukan secara berkala sesuai rencana kerja dan fokus pemberian sosialisasi kepada Wajib Pajak yang potensial dalam meningkatkan penerimaan pajak. Sementara dalam efektivitas pelayanan

dilakukan baik dengan tatap muka secara langsung dan saluran lain baik berupa *WhatsApp*, telepon, *media social*, dan email KPP.

5. Sasaran Strategis 5: Pengawasan pembayaran masa yang efektif

a) Indikator Kinerja Utama 8: Persentase pengawasan pembayaran masa

Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dari Wajib Pajak Strategis memperoleh realisasi sebesar 118.82% dan dari Wajib Pajak Kewilayahan sebesar 102.31%. Dari 2 indikator tersebut dapat diambil realisasi Pengawasan Pembayaran Masa di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu memiliki realisasi IKU sebesar 110.57% dari target 90% sehingga memiliki capaian IKU di Triwulan IV Tahun 2024 sebesar **120.00%**.

6. Sasaran Strategis 6: Pengawasan kepatuhan material yang efektif

a) Indikator Kinerja Utama 9: Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan senilai 120.00% dari target senilai 100% sehingga capaian IKU ini sebesar **120.00%**. Capaian ini masih perlu dioptimalkan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas LHP2DK untuk penyelesaian permintaan dan peningkatan kuantitas LHPT Strategis untuk penyelesaian dengan melakukan penerbitan SP2DK dan pemanfaatan data approweb, apportal dan data lain secara optimal.

b) Indikator Kinerja Utama 10: Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Target persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah 100% dengan komposisi Data STP dan Data Matching. Pada akhir tahun 2024, realisasi dari pemanfaatan Data STP adalah sebesar 120% dengan rincian terdapat 1750 Daftar Nominasi STP dan target STP sebanyak 1750 STP dengan realisasi STP yang terbit sebanyak 3365 STP. Pada pemanfaatan Data Matching terealisasi sebesar 120% dengan rincian 1338 Data Pemicu ditargetkan sebanyak 1056 dan yang ditindaklanjuti oleh *Account Representative* sebanyak 205 dan oleh Wajib Pajak sebanyak 1190 data. Oleh karena itu dapat diambil data persentase capaian IKU Pemanfaatan Data sebesar **120%**.

c) Indikator Kinerja Utama 11: Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Target Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu adalah sebesar 100% dengan komposisi Laporan Pelaksanaan Tugas Komite

Kepatuhan, Kulaitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan dan Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan. Berdasarkan perhitungan gabungan realisasi IKU KKWP oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan didapat realisasi sebesar **119.32%** sehingga capaian IKU Esektifitas Pengelolaan KKWP KPP tepat waktu adalah sebesar **120%**.

7. Sasaran Strategis 7: Penegakan hukum yang efektif

- a) **Indikator Kinerja Utama 12: Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian**
Realisasi IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan Tahun 2024 adalah sebesar 120.00% dari target 100% sehingga capaian IKU tersebut adalah **120%** dengan komposisi capaian 14.37% dari persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP, 23.78% dari persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP terbit tahun berjalan, 28.45% dari persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan, 30% dari persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan 6% dari persentase nilai ketetaapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi.
- b) **Indikator Kinerja Utama 13: Tingkat Efektivitas penagihan**
Realisasi efektivitas penagihan pada tahun 2024 sebesar 117.56% dari target sebesar 75%, sehingga capaian IKU sebesar **120.00%**. Hal ini disebabkan karena penyelesaian Surat Teguran, Surat Paksa, Blokir, Sita/SPMP, dan Penjualan Barang Sitaan oleh seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (P3) dilakukan secara optimal.
- c) **Indikator Kinerja Utama 14: Persentase Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan**
Dari 1 usulan pemeriksaan bukti permulaan yang disetujui Komite Pusat diperoleh realisasi IKU sebesar 100% sehingga capaian IKU tindak lanjut data usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan tahun 2024 sebesar **100%**. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa penyusunan DSPP dan Kerjasama antara Seksi Pengawasan dan P3 sudah berjalan baik.

8. Sasaran Strategis 8: Data dan informasi yang berkualitas

- a) **Indikator Kinerja Utama 14: Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan**
Penyelesaian laporan pengamatan pada Tahun 2024 terealisasi sebesar 100% dengan rincian realisasi penyelesaian Laporan Pengamatan sebanyak 5 laporan

dari target 4 laporan dan realisasi bobot jangka waktu sebesar 5.5 sehingga capaian IKU tersebut sebesar **120%**.

9. Sasaran Strategis 9: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

a) Indikator Kinerja Utama 16: Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Standar kompetensi pegawai terdiri dari persentase pejabat struktural yang memenuhi standar kompetensi dan persentase pejabat fungsional dan pelaksana umum yang memenuhi standar kompetensi. Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM >80% sebanyak 3 pegawai dan jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti assessment center sebanyak 3 pegawai. Sedangkan jumlah fungsional pemeriksa pajak, asisten penilai, dan penilai pajak dan pelaksana umum yang lulus uji kompetensi teknis sebanyak 11 orang. Sedangkan berdasarkan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dinilai kurang efektif dengan nilai 60. Oleh karena itu, pada triwulan IV tahun 2024 realisasi IKU tersebut sebesar 117.50% dari target 100% dan memiliki capaian IKU sebesar **117.50%**.

b) Indikator Kinerja Utama 16: Indeks penilaian integritas unit

Target IKU Indeks Penilaian Integritas Unit sebesar 85 dari indeks pelayanan perpajakan, indeks pengawasan kepatuhan, indeks pemeriksaan pajak dan indeks penagihan pajaka dikurangi faktor koreksi. Berdasarkan tarikan data Mandor per tanggal 16 Januari 2025 diperoleh realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu sebesar 95.95 dari target 85 sehingga capaian IKU yang dicapai sebesar **112.88%**.

c) Indikator Kinerja Utama 18: Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko sebesar 99.44% dari target 90% dalam tahun 2024 dengan komposisi 39.50 Indeks Implementasi Manajemen Kinerja dan 50 Indeks Implementasi Manajemen Risiko yang selesai dijalankan. Oleh karena itu IKU ini memiliki capaian IKU sebesar **110.49%**.

10. Sasaran Strategis 11: Pengelolaan keuangan yang akuntabel

a) Indikator Kinerja Utama 19: Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Perhitungan Prognosa PKPA Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan nilai SMART adalah 100 sedangkan berdasarkan nilai IKPA adalah sebesar 98.96 sehingga diperoleh nilai realisasi NKA sebesar 99.48. Dengan demikian Indeks Kinerja Kualitas Kinerja Anggaran sebesar **120%** karena realisasi NKA \geq 95.

B. Realisasi Anggaran

Sumber pembiayaan operasional KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu berasal dari dana DIK dan TO. Anggaran belanja DIPA yang diterima yaitu sebesar Rp. 6.278.382.000 terdiri dari DIPA belanja non pegawai sebesar Rp. 5.330.616.000 dan DIPA Belanja Pegawai sebesar Rp. 947.766.000

Adapun dari anggaran belanja DIPA tersebut di atas, dialokasikan untuk kegiatan Program Pengelolaan Penerimaan negara sebesar Rp 802.926.000 dengan rincian (1) Ekstensifikasi Penerimaan Negara Rp. 357.876.000, (2) Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi sebesar Rp. 210.950.000, dan (3) pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum sebesar Rp.234.102.000. Selain program pengelolaan penerimaan negara, anggaran DIPA belanja juga dialokasikan untuk kegiatan Program Dukungan Manajemen dengan total anggaran sebesar Rp 5.461.019.000, berupa (1) pengelolaan keuangan, BMN, dan umum sebesar Rp 4.513.253.000 dan (2) Pengelolaan Organisasi dan SDM sebesar Rp 947.766.000.

Realisasi Anggaran terhadap keperluan program pengelolaan penerimaan Negara sebesar Rp 776.606.335 (96,72%) dengan rincian (1) Pelaksanaan Ekstensifikasi Penerimaan Negara sebesar Rp 345.234.867 (96,47%), (2) Pelaksanaan Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi sebesar Rp 206.997.499 (98,13%), dan (3) Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum sebesar Rp 224.373.969 (95,84%). Selain itu, untuk keperluan Program Dukungan Manajemen ter-realisis sebesar Rp 5.355.282.842 (98,06%) dengan rincian (1) Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum sebesar Rp 4.471.297.842 (99,07%) dan Pengelolaan Organisasi dan SDM sebesar Rp 883.985.000 (93,27%).

Sehingga penyerapan DIPA adalah sebesar Rp.6.131.889.177 dengan sisa anggaran Rp 146.492.823 sehingga diperoleh realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 883.985.000 sedangkan non pegawai sebesar Rp 4.834.273.223 untuk belanja barang dan Rp 413.630.954 untuk belanja modal satker.

BAB IV

PENUTUP

Keberhasilan KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu tahun 2024 dalam memenuhi target penerimaan yang dibebankan sebesar 100.62% dengan total realisasi penerimaan sebesar Rp. 982.524.651.749,-. Hal ini tentunya adalah wujud dari sejumlah program yang telah ditetapkan diantaranya yaitu melalui kegiatan penggalian potensi pajak, kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM), kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), peningkatan kepatuhan wajib pajak, langkah-langkah peningkatan kualitas pelayanan, penyuluhan kepada wajib pajak, pencairan tunggakan pajak, penyediaan data potensi pajak, serta efektifitas pemeriksaan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi pegawai yang dilaksanakan dengan standar jam pelatihan, dialog kinerja organisasi, dan *focus grup discussion*.

Oleh karena itu, dalam rangka mempertahankan Indikator Kinerja Utama yang telah tercapai dan meningkatkan kinerja untuk masa mendatang, KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu merencanakan evaluasi sejumlah program yang sudah ada dan peningkatan dengan program yang lebih intensif baik didalam maupun diluar kantor. Peningkatan ini akan dilakukan dalam hal pelayanan dan sosialisasi masif dengan memanfaatkan teknologi, efektivitas pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan demi tercapainya target penerimaan yang ditetapkan di tahun 2025.

Jakarta, 30 Januari 2024

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Syaiful Abidin

NIP. 19681216 199503 1 001



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
2. Data Kepegawaian KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu per 31 Desember 2024.